

Tabel IV.5

Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing						
Sasaran 1: Meningkatkan pemerataan taraf pendidikan masyarakat						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100 %	1.893.692.537.669	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PP-1
		Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79,64 %			
		Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100 %			
		Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	69,05 %			
		Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	72,00 %			
		Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	77,15 %			
		Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	77,00 %			
		Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	91,00 %			
		Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	83,44 %			
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	100 %	16.359.087.608	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PP-1
Sasaran 2: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat						

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	10,7 Rasio	148.127.921.389	Dinas Kesehatan	PP-2
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan kerja yang dimagangkan dan bekerja	66,50 Persen	3.148.909.819	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PP-1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
5	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	60,13 %	15.076.565.326	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-1
Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	300 orang	2.527.267.258	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PP-1
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas						
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
7	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	1 %	202.799.309.529	Dinas Kehutanan	PP-3
		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0.71 %			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM potensial ekspor	40 UKM	1.690.263.283	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang masuk pasar digital	10 %	5.343.502.674	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	70 Jenis	1.837.873.610	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan industri pengolahan non migas dan non batubara	5,56 %	13.226.279.341	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
12	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	63,33 %	5.470.407.569	Dinas Pariwisata	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
13	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %	3.343.635.718	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PP-3
		Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu	100 %			
14	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	12 Minat	3.044.966.719	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PP-3
15	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	2 Dokumen IPRO	2.776.544.151	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PP-3

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
16	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun	49.000 Ha	732.112.900	Dinas Perkebunan	PP-3
17	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan sarana perkebunan	25,41 %	20.336.416.914	Dinas Perkebunan	PP-3
18	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	23,03 %	3.704.416.939	Dinas Perkebunan	PP-3
		Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat	52,99 %			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
19	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	97.75 Skor	4.229.173.741	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3, PP-8
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	86.5 Skor			
20	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan	0 %	1.120.534.907	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3, PP-8
		Jumlah kecamatan yang meningkat status ketahanan pangannya	1 Kecamatan			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
21	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana pertanian tanaman pangan	41,76 %	2.546.687.896	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3
		Tingkat pemenuhan prasarana pertanian hortikultura	43,0 %			
22	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	36 %	27.009.204.884	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3
		Tingkat pemenuhan sarana pertanian hortikultura	41.57 %			
		Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	35,7 %			
		Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan	11.95 %			

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
		Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi	98 %			
		Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura	50 %			
23	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	80 %	4.587.478.128	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
24	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	99,72 Skor	15.727.562.222	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-3
25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	97,29 Skor	43.766.051.962	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-3
		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	88,00 Skor			
26	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	92,41 Skor	11.928.802.539	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-3
		Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	95,81 Skor			
		Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	99,18 Skor			
27	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	99,73 Skor	3.254.022.490	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
28	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	195000 Ton	15.911.198.591	Dinas Kelautan dan Perikanan	PP-3
29	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	201000 Ton	11.556.651.781	Dinas Kelautan dan Perikanan	PP-3
30	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk olahan hasil perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	11 Produk	1.340.802.812	Dinas Kelautan dan Perikanan	PP-3
Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif	10.360 Orang	21.108.112.272	Dinas Sosial	PP-5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
32	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	35 %	5.982.997.693	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	PP-5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
33	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	156,59 Ha	122.417.786.239	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
34	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas harga barang pokok dan barang penting	14 %	868.676.243	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	PP-5
		Persentase kinerja realisasi pupuk	90 %			
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase layanan lalu lintas jalan provinsi dan AKDP	86,00 %	198.693.120.897	Dinas Perhubungan	PP-4, PP-8
		Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 Keberangkatan	0,005 Angka			
		Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	165 Kejadian			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio kemantapan jalan provinsi	86,23 %	2.472.126.229.684	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4, PP-8
		Penambahan Ruas Jalan Baru	2 Ruas			

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
37	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	9730 Ha	193.668.042.006	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4, PP-8
		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	140 Ha			
		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	60 Lt/detik			
		Panjang pantai kritis yang ditangani	0.33 Km			
38	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani	12,76 %	23.864.950.396	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4, PP-8
39	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	83.40 %	6.286.770.600	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4, PP-8
40	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	60,13%	15.076.565.326	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4, PP-8
41	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,90 %	13.160.866.399	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4, PP-8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
42	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	156,59 Ha	122.417.786.239	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4, PP-8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
43	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase kelurahan/desa yang teraliri listrik 24 jam	97,78 %	64.759.950.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PP-4, PP-8
		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	100,00 %			
		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	300,00 kWp			
		Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	38,73 %			
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup						
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
44	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran	≤5 (tercemar ringan) Indeks	8.230.269.367	Dinas Lingkungan Hidup	PP-6
		Indeks Standar Pencemar Udara	47 (Baik) Indeks			
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
45	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	1 %	202.799.309.529	Dinas Kehutanan	PP-6
		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0.71 %			
46	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola	730.007,98 Ha	12.500.658.192	Dinas Kehutanan	PP-6
47	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	196.336 Ha	4.204.318.570	Dinas Kehutanan	PP-6
48	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000 Ha	70.743.225.230	Dinas Kehutanan	PP-6
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
49	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	100 %	5.107.708.743	Dinas Perkebunan	PP-6
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
50	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase desa yang dibangun PLTS pada desa belum berlistrik PLN	38,73 %	64.759.950.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PP-6
		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	300,00 kWp			
		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	100,00 %			
		Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	97,78 %			
51	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	484.906,515 Ton CO2e/Tahun	104.903.602.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PP-6
		Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi	45,76 %			
		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi	35,78 %			
Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi						
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK						
KEPEGAWAIAN						
52	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	90,5 indeks	26.342.967.234	Badan Kepegawaian Daerah	PP-7
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
53	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	87 Persen	25.152.765.271	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PP-7
SEKRETARIAT DAERAH						

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2025		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
54	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kelembagaan	73 Indeks	8.019.807.966	Biro Organisasi	PP-7
		Indeks Kematangan Organisasi	45 Indeks			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
55	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	82 %	39.506.416.323	Dinas Komunikasi dan Informatika	PP-7
INSPEKTORAT DAERAH						
56	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal pemda provinsi dan kab/kota	100 %	7.577.450.600	Inspektorat	PP-7